

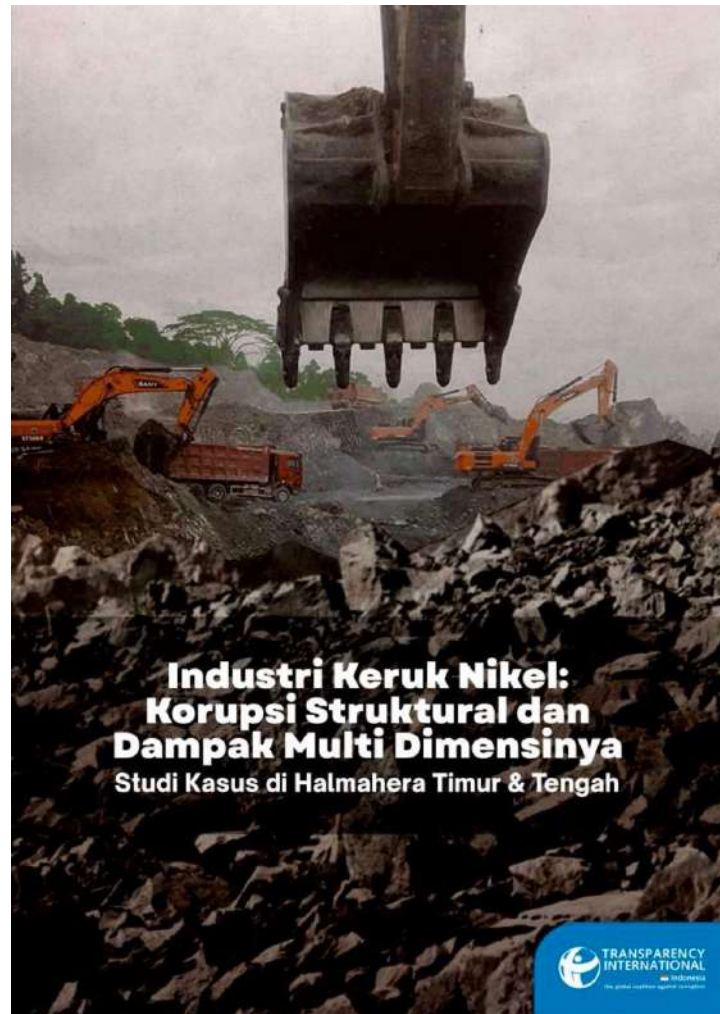
Penguatan Pencegahan Korupsi terkait Pertambangan Nikel Tiongkok di Indonesia



Transparency International Indonesia
Sept 2025

Smelters and Strategic Parks: China's Role in Indonesia's Nickel Value Chain







Pentingnya Nikel bagi Indonesia

- ❑ **Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia** — sebuah fakta yang menempatkan negara ini di jantung transisi energi global.
- ❑ **Kunci dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik global** — Nikel kini menjadi komponen kritis dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik, dan Indonesia memainkan peran penting dalam memastikan keseimbangan pasokan dan permintaan.
- ❑ **Pilar utama kebijakan hilirisasi industri** — Komoditas ini telah menjadi pilar utama kebijakan hilirisasi, terutama setelah pemerintah memberlakukan larangan ekspor mineral mentah.
- ❑ **Menarik investasi besar dari Tiongkok** — Akibatnya, investasi besar dari Tiongkok mengalir deras ke Indonesia, terutama melalui kawasan industri seperti Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali dan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Weda Bay.
- ❑ **Disertai risiko tata kelola dan korupsi** — Perkembangan ini semakin diiringi dengan risiko tata kelola dan kerentanan korupsi, mulai dari proses perizinan yang tidak transparan hingga persoalan lingkungan dan ketenagakerjaan.





Tujuan Penelitian

- ❑ Studi ini bertujuan memetakan **risiko korupsi** dan **kesenjangan tata kelola** di sektor nikel Indonesia.
- ❑ Fokus khusus pada **proyek yang didukung investasi Tiongkok**, mengingat skala dan dominasi mereka dalam rantai nilai nikel Indonesia.
- ❑ **Kawasan Industri Weda Bay (IWIP), Maluku Utara** dipilih sebagai lokasi strategis penelitian. IWIP adalah simbol nasional hilirisasi nikel, namun juga memunculkan kekhawatiran soal **perizinan, konflik lahan, dan isu sosial-lingkungan**.
- ❑ Studi ini menelaah **sistem perizinan, kepatuhan, dan penegakan hukum**, serta menelusuri bagaimana praktik lapangan sering berbeda dengan regulasi formal. Tujuan akhirnya: mengidentifikasi **kerentanan yang memungkinkan praktik rente dan korupsi sistemik**.



Metodologi Penelitian



- ❑ **Tinjauan Pustaka:** (1) Menganalisis berbagai sumber sekunder, termasuk laporan 2023 Transparency International Indonesia yang menggunakan kerangka MACRA. (2) Memberikan dasar untuk memahami pola korupsi, politik perizinan, dan dinamika tata kelola di sektor sumber daya alam.
- ❑ **Focus Group Discussion (FGD):** Dilaksanakan di Ternate, melibatkan akademisi, pemerintah daerah, jurnalis, dan organisasi masyarakat sipil. Memetakan proses perizinan, mengidentifikasi area rawan korupsi, dan memperjelas ruang lingkup studi.
- ❑ **Wawancara Mendalam:** Dengan pihak yang tidak hadir di FGD: nelayan, anggota DPRD lokal, warga terdampak, pengacara perusahaan, dan staf PT IWIP (hubungan industrial & akuisisi lahan). Mengonfirmasi temuan FGD serta mengeksplorasi kesenjangan antara regulasi dan praktik lapangan.
- ❑ **Kuesioner Berbasis Risiko (MACRA):** (1) Menggunakan indikator MACRA, dibagikan kepada peserta FGD. (2) Pertanyaan mengeksplorasi celah regulasi, risiko tata kelola, dan dampak sosial-lingkungan pasca revisi UU Minerba.



ti.or.id



tiindonesia



TIIndonesia



Temuan Utama



01

**Dominasi Tiongkok
dalam Hilirisasi Nikel**

**Risiko Korupsi di sektor
Hulu dan Hilir**

02

03

**Tumpang Tindih Regulasi &
Fragmentasi Kelembagaan**

**Lemahnya Pengawasan
terhadap Akuisisi Asing**

04

05

**Ketidakadilan Sosial &
Ketenagakerjaan**



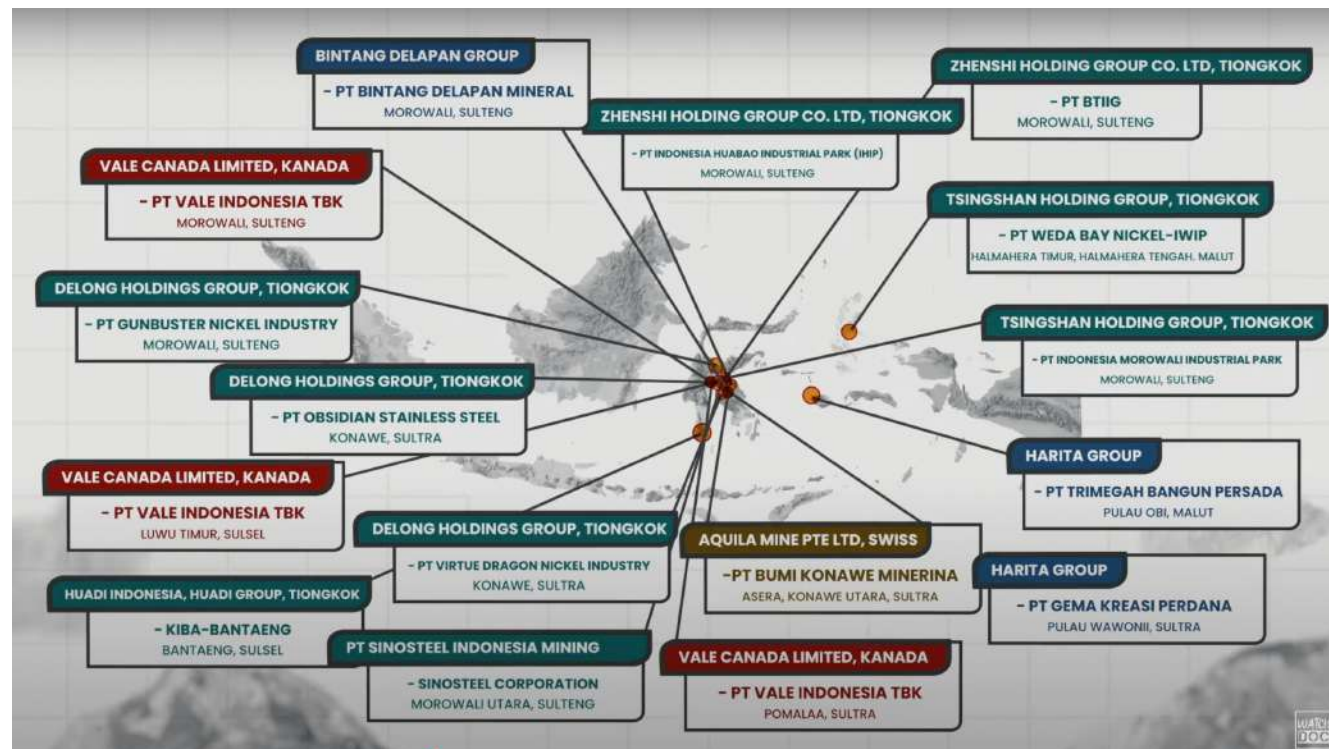
Lebih dari 75% kapasitas pemurnian nikel Indonesia dikuasai oleh perusahaan Tiongkok, terutama melalui proyek strategis seperti Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).



Perusahaan-perusahaan ini umumnya tidak mengajukan izin tambang dari awal, melainkan mengakuisisi perusahaan lokal yang sudah memegang IUP sah, lalu membangun smelter nikel di kawasan industri yang ditetapkan pemerintah. Kawasan ini mendapatkan kemudahan perizinan melalui daftar putih investasi (investment whitelist).



Dominasi ini telah menempatkan Tiongkok sebagai aktor kunci dalam rantai pasok nikel Indonesia — mulai dari pemurnian hingga penyediaan bahan baku untuk pasar baterai kendaraan listrik (EV) global. Namun, **model investasi ini menimbulkan kekhawatiran**, karena sering kali melewati **proses peninjauan publik yang menyeluruh** serta **mekanisme pengawasan lintas sektor**.



- ❑ Indonesia bukan hanya produsen nikel terbesar di dunia, tetapi juga menyumbang **lebih dari 50% pasokan dan cadangan nikel global**. Angka ini naik drastis dari hanya **16% pada tahun 2019**.
- ❑ Sumber daya ini terkonsentrasi di **empat provinsi utama**: Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.



- Sejak ditetapkan sebagai **Proyek Strategis Nasional dalam RPJMN 2025–2029**, hilirisasi nikel menjadi salah satu prioritas utama pembangunan Indonesia. Dampaknya, kita melihat menjamurnya proyek-proyek pengolahan nikel di seluruh negeri.
- Data terbaru menunjukkan ada **116 proyek peleburan nikel** yang sedang berjalan, baik yang sudah beroperasi, dalam tahap pembangunan, maupun yang masih direncanakan.

*HILIRISASI NIKEL adalah
Proyek Strategis Nasional (PSN)
dalam RPJMN 2025-2029
menyebabkan menjamurnya
Industri Pengolahan Nikel.*

116

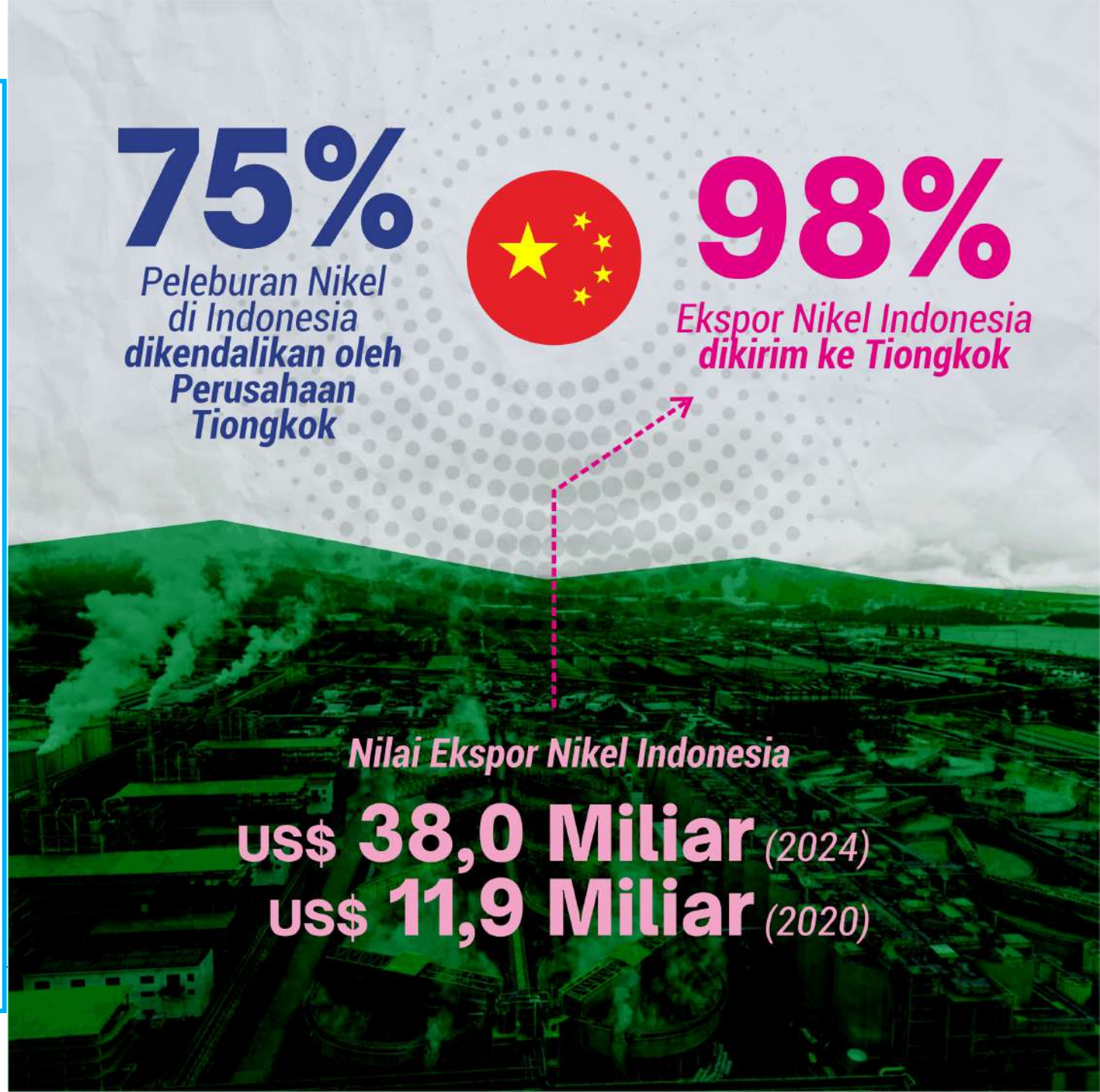
Proyek Peleburan
di seluruh Indonesia
(termasuk sedang
dibangun &
direncanakan)

Perusahaan Cina
mengendalikan

75%

Kapasitas
Penyulingan

- Pertumbuhan pesat industri nikel Indonesia sangat bergantung pada investasi Tiongkok. Saat ini, **sekitar 75% kapasitas peleburan nikel dikuasai oleh perusahaan Tiongkok**, dan **98% ekspor nikel Indonesia dikirim ke Tiongkok**.
- Dominasi ini memperlihatkan betapa eratnya keterikatan Indonesia dalam jaringan industri Tiongkok, terutama di kawasan industri strategis seperti **IMIP di Morowali** dan **IWIP di Weda Bay**, yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional.



- Saat ini, **64% permintaan nikel global berasal dari Tiongkok**, menjadikannya konsumen terbesar di dunia.
- Di sisi lain, Indonesia tidak hanya menjadi pemasok utama nikel ke Tiongkok, tetapi juga tercatat sebagai **penerima investasi Tiongkok terbesar melalui Inisiatif Sabuk dan Jalan**.
- Artinya, hubungan Indonesia dan Tiongkok di sektor nikel tidak bisa dipandang hanya sebatas perdagangan. Ini sudah masuk ke level strategis: Indonesia sebagai produsen terbesar nikel dunia, dan Tiongkok sebagai konsumen sekaligus investor terbesar. Inilah yang membuat isu tata kelola dan kedaulatan sumber daya menjadi semakin penting.



2 Temuan Utama



Risiko Korupsi di sektor Hulu dan Hilir

Praktik suap dan gratifikasi marak terjadi dalam penerbitan izin tambang (IUP), yang sebagian besar disebabkan oleh **kurangnya transparansi publik.**



Kriminalisasi aktivis dan minimnya partisipasi publik dalam proses perizinan dan pembebasan lahan menciptakan lingkungan yang represif dan **rawan korupsi.**



Ketiadaan audit independen pada proyek smelter membuka peluang terjadinya **manipulasi data teknis, laporan lingkungan, dan batas proyek.**



Korupsi dalam perizinan

- Banyak izin usaha pertambangan (IUP) diterbitkan melalui praktik **suap, gratifikasi, dan lobi politik**.
- Akibatnya, izin sering diberikan kepada perusahaan yang tidak memenuhi syarat teknis atau lingkungan.
- Kebijakan perizinan menjadi **transaksional**, bukan berbasis tata kelola yang baik.

Korupsi dalam penetapan proyek strategis

- Proyek besar seperti **smelter** atau kawasan industri sering ditetapkan sebagai **Proyek Strategis Nasional (PSN)**.
- Status ini memberi kemudahan perizinan dan insentif fiskal, tetapi membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.
- Pejabat lokal maupun pusat bisa mendapat keuntungan pribadi dari percepatan izin.

**INVESTASI DATANG
HUTAN DITEBANG
WARGA MERADANG
BENCANA DATANG**

**PROTES
MASYARAKAT**

DEFORESTASI

**POLUSI AIR
& UDARA**

KORUPSI

Masyarakat yang memprotes datangnya investasi Direpresi & Dikriminalisasi Aparat Keamanan

Membabat habis Hutan untuk tambang terbuka & untuk membangun kawasan industri yang didirikan dekat tambang. Hilangnya hutan musnahkan mata pencaharian lokal, membuat area sekitar menjadi sering mengalami bencana banjir & longsor

Polusi air paksa nelayan berlayar lebih jauh untuk cari ikan

Polusi udara dari smelter & pembangkit listrik untuk smelter sebabkan banyak penyakit pernapasan

2 Gubernur tersangkut kasus korupsi terkait nikel



Korupsi memperlemah kebijakan lingkungan & sosial

- Ketika korupsi terjadi, **AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan)** dan aturan sosial sering diabaikan.
- Masyarakat terdampak kehilangan ruang partisipasi karena keputusan sudah “dibeli” oleh perusahaan.
- Akhirnya, kebijakan yang ada gagal melindungi lingkungan dan hak warga.

**INVESTASI DATANG
HUTAN DITEBANG
WARGA MERADANG
BENCANA DATANG**

**PROTES
MASYARAKAT**

Masyarakat yang memprotes datangnya investasi Direpresi & Dikriminalisasi Aparat Keamanan

DEFORESTASI

**POLUSI AIR
& UDARA**

KORUPSI

Membabat habis Hutan untuk tambang terbuka & untuk membangun kawasan industri yang didirikan dekat tambang. Hilangnya hutan musnahkan mata pencaharian lokal, membuat area sekitar menjadi sering mengalami bencana banjir & longsor

Polusi air paksa nelayan berlayar lebih jauh untuk cari ikan

Polusi udara dari smelter & pembangkit listrik untuk smelter sebabkan banyak penyakit pernapasan

2 Gubernur tersangkut kasus korupsi terkait nikel



3 Temuan Utama



Tumpang Tindih Regulasi & Fragmentasi Kelembagaan

Kewenangan perizinan terfragmentasi antara Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian, sehingga menghambat koordinasi lintas sektor dan integrasi data.



Sistem OSS-RBA belum menyediakan data real-time yang dapat diakses publik, sehingga berkontribusi pada pengawasan yang tidak transparan terhadap proyek pertambangan dan smelter.



OSS-RBA adalah singkatan dari **Online Single Submission - Risk-Based Approach**. Merupakan **sistem perizinan usaha terintegrasi** yang diluncurkan Pemerintah Indonesia pada tahun 2021. Sistem ini dikelola oleh **Kementerian Investasi/BKPM**. Tujuannya: menyederhanakan proses perizinan usaha dengan pendekatan berbasis tingkat risiko, di mana semakin tinggi risiko suatu usaha, semakin ketat pula persyaratannya.



4 Temuan Utama



Lemahnya Pengawasan dan Akuisisi Asing

Akuisisi perusahaan tambang oleh investor asing, khususnya dari Tiongkok, tidak disertai audit pengendalian di tingkat nasional.

Tidak ada proses sistematis untuk memverifikasi pemilik manfaat (beneficial owners) yang sebenarnya di balik perusahaan yang diakuisisi.

Faktanya, mengidentifikasi pemilik manfaat (beneficial ownership) sangat penting untuk mencegah **pencucian uang, penghindaran pajak, dan konflik kepentingan** di sektor ekstraktif.

Banyak perusahaan asing menghindari kewajiban ini dengan menggunakan nominee lokal — yaitu individu atau entitas yang secara formal tercatat sebagai pemilik, tetapi dalam praktiknya kendali tetap berada di tangan investor asing, tanpa mekanisme pengawasan atau verifikasi yang memadai.



4 Temuan Utama



Lemahnya Pengawasan dan Akuisisi Asing

Strategi Investor Tiongkok:

1. Banyak investor Tiongkok **tidak mengurus izin dari awal**, melainkan **mengakuisisi perusahaan lokal** yang sudah punya IUP OP.
2. Cara ini mempercepat masuknya investasi, tapi juga membuka celah **kurangnya verifikasi dan transparansi kepemilikan**.

Fragmentasi Regulasi:

1. **Kementerian ESDM** mengatur izin hulu (IUP Eksplorasi & IUP OP).
2. **Kementerian Perindustrian** mengatur izin hilir (IUI untuk smelter).
3. Pengawasan jadi **terfragmentasi**: data kepemilikan, produksi, dan sumber bijih tidak terintegrasi.



4 Temuan Utama



Lemahnya Pengawasan dan Akuisisi Asing

Dampak Fragmentasi

- Smelter bisa beroperasi legal meskipun menyerap bijih dari tambang yang tidak patuh.
- **Tidak ada inspeksi terpadu** → tumpang tindih izin, pengawasan lemah, kebijakan tidak konsisten.
- Transparansi publik minim → masyarakat sulit melacak rantai pasok dari tambang ke smelter.

Celah untuk Korupsi

Fragmentasi dan lemahnya koordinasi membuka ruang untuk:

- **Praktik suap/gratifikasi** dalam akuisisi dan perizinan.
- **Eksplorasi berlebihan** tanpa pengawasan.
- **Penghindaran aturan** dengan memanfaatkan celah antar-kementerian

Implikasi Besar

- Indonesia semakin **bergantung pada modal asing, khususnya Tiongkok**.
- Tata kelola jadi **sistemik lemah**: perizinan tumpang tindih, pengawasan longgar, dan arah kebijakan mudah dipengaruhi kepentingan investor besar.



5 Temuan Utama



Ketidakadilan Sosial & Ketenagakerjaan

Di banyak kawasan industri nikel, terutama yang didominasi investasi Tiongkok seperti IMIP dan IWIP, terdapat kesenjangan mencolok antara pekerja lokal dan pekerja asing.

Pekerja asing—sebagian besar dari Tiongkok—sering mendapat upah lebih tinggi, kondisi kerja yang lebih baik, dan mobilitas karier yang lebih besar. Sementara itu, pekerja lokal umumnya hanya diberi kontrak sementara, upah minimum, dan lingkungan kerja yang tidak aman.

Selain itu, minimnya pelaporan yang transparan mengenai pelanggaran ketenagakerjaan — seperti jam kerja berlebihan, pemutusan kerja sewenang-wenang, dan kecelakaan kerja fatal — membuat pekerja dan serikat buruh sangat sulit memperjuangkan atau menegakkan hak-hak dasar ketenagakerjaan.





Rekomendasi

01

Pemerintah Indonesia

- ❑ **Terapkan audit pengendalian** pada akuisisi tambang, termasuk verifikasi keamanan nasional dan kepemilikan lintas negara.
- ❑ **Wajibkan keterbukaan publik** atas struktur beneficial ownership untuk semua perusahaan tambang.
- ❑ **Kembangkan sistem pemetaan izin & konsesi berbasis real-time** yang dapat diakses publik, mencakup kepemilikan, status, dan lokasi proyek.
- ❑ **Perkuat pengawasan lintas kementerian** (khususnya ESDM dan Kemenperin) melalui dasbor izin terintegrasi dan audit bersama berkala.
- ❑ **Terapkan masa tunggu (cooling-off period) wajib** bagi mantan pejabat publik sebelum bergabung dengan perusahaan tambang.
- ❑ **Wajibkan verifikasi independen** untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), terutama yang didanai modal Tiongkok, guna memitigasi risiko pencucian uang dan kerusakan lingkungan.





Rekomendasi

02

Perusahaan dan Investor Asing

- ❑ **Ungkapkan struktur beneficial ownership dan grup perusahaan** secara terbuka dalam sistem nasional **MODI**.
- ❑ **Laksanakan konsultasi publik yang bermakna**, termasuk **Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)**, khususnya di wilayah masyarakat adat.
- ❑ **Bangun sistem transparan dan diaudit secara berkala** untuk pelaporan kecelakaan kerja dan dampak lingkungan.
- ❑ **Terapkan uji tuntas HAM (human rights due diligence)** dan standar **ESG** sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan jangka panjang.



ti.or.id



tiindonesia



TIIndonesia



Rekomendasi

03

Masyarakat Sipil & Komunitas Lokal

- ❑ **Awasi dengan ketat proses perizinan dan akuisisi** yang melibatkan perusahaan asing.
- ❑ **Dorong peningkatan literasi hukum dan pelatihan FPIC bagi komunitas lokal** untuk memperkuat perlindungan hak atas tanah dan lingkungan.
- ❑ **Bentuk jaringan pemantauan hak-hak buruh di kawasan industri pertambangan** seperti **IMIP** dan **IWIP**.

04

Media dan Akademisi

- ❑ **Perluas liputan investigatif dan riset kebijakan publik** terkait proyek pertambangan serta investasi asing strategis.
- ❑ **Bangun basis data publik berbasis teknologi open-source** untuk melacak akuisisi, perizinan, dan dampak lingkungan di sektor pertambangan.



Laporan lengkap, silahkan scan:

